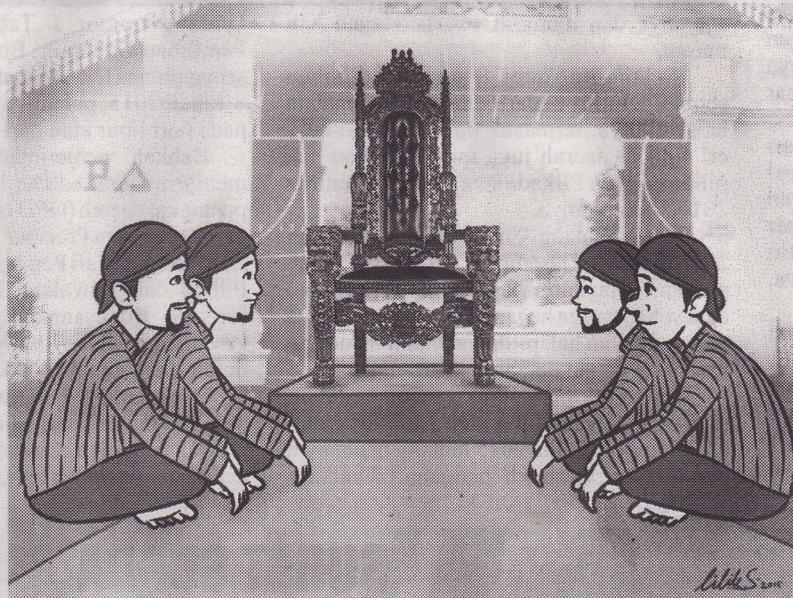


# Menanti Jumeng Paku Alam X

Oleh: Hendra Kurniawan



PASCA wafatnya Sri Paduka Paku Alam IX, maka tak lama lagi Jumeng Sri Paduka Paku Alam X akan digelar. Tentu ini menjadi momentum yang ditunggu oleh masyarakat khususnya di Yogyakarta. Bukan hanya sekedar memastikan yang akan memimpin Kadipaten Pakualaman selanjutnya, namun juga siapa yang bakal menjadi Wakil Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal ini secara tegas telah diatur dan menjadi salah satu penciri keistimewaan DIY.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY diamanatkan bahwa Wakil Gubernur DIY adalah Adipati Paku Alam yang bertahta. Lebih lanjut dalam Perdas DIY Nomor 2 Tahun 2015 diatur bahwa Adipati Paku Alam yang bertahta ialah Adipati yang jumeneng sebagai Adipati Paku Alam sesuai dengan paugeran dan prosesi adat Kadipaten. Untuk saat ini karena masih dalam suasana berkabung tentu saja semua pihak perlu bersabar menunggu waktu yang tepat.

Proses suksesi merupakan wilayah internal Kadipaten Pakualaman sehingga tidak dibatasi waktunya. Apalagi terkait hal ini ada paugeran dan ikatan adat yang perlu ditaati. Sejauh ini, Pura Pakualaman telah menunjuk putra sulung Sri Paduka Paku Alam IX, Kanjeng Bendoro Pangeran Haryo (KBPH) Suryodilogo menjadi calon penerus tahta Pakualaman. Meski cukup rentan konflik internal dalam keluarga Pakualaman, namun proses pengangkatan KBPH Suryodilogo dipastikan

tetap berjalan.

Sekalipun penetapan Adipati Paku Alam tidak dibatasi waktu, namun perlu diperhatikan bahwa kursi Wakil Gubernur DIY merupakan jabatan publik yang harus segera terisi. Untuk itu pihak Pura Pakualaman diharap segera mempublikasikan paugeran terkait jumenengan agar ada kejelasan. Jangan sampai terjadi kekosongan jabatan Wakil Gubernur dalam jangka waktu yang terlalu lama. Hal ini tentu akan berdampak utamanya bagi jalannya roda pemerintahan dan pelayanan yang prima bagi masyarakat. Sebagai daerah istimewa, Yogyakarta memiliki banyak kegiatan dan program yang harus ditangani dengan baik dan butuh perhatian khusus. Untuk itu

peran Wakil Gubernur sangat vital dan diperlukan.

Keistimewaan berbasis historis Keberadaan Pakualaman memiliki akar historis yang sangat kuat. Pakualaman menjadi daerah otonom sejak era kolonialisme Inggris di bawah Raffles bercokol (1811-1816). Terjadinya konflik internal dalam tubuh keraton Kasultanan Yogyakarta yang kemudian ditunggangi oleh Inggris melahirkan sebuah kadipaten baru. Inggris bersiasat memecah belah dan mengurangi daerah kekuasaan Kasultanan Yogyakarta.

Ketika itu sejumlah 4.000 cacah tanah di Karang Kemuning diberikan kepada Pangeran Notokusumo yang adalah saudara dari Sri Sultan

Hamengku Buwono III. Pangeran Notokusumo juga diperkenankan memiliki 100 orang prajurit dan membangun istananya di dekat Keraton Yogyakarta. Untuk kedudukannya ini, beliau berhak menyanggah gelar Adipati Paku Alam. Pada 17 Maret 1813, Pangeran Notokusumo mengukuhkan tahtanya dan bergelar Pangeran Adipati Paku Alam I.

Perkembangan selanjutnya begitu menarik, kedua monarki di Yogyakarta ini tidak pernah terpancing untuk berseberangan satu sama lain. Sejarah belum pernah mencatat mereka saling menjatuhkan dan hendak menyingkirkan yang lain. Pada masa pendudukan Jepang, Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman sempat diadu domba, namun justru keduanya semakin menguatkan relasi. Ketika itu Paku Alam VIII memutuskan untuk mengadakan reunifikasi antara Kadipaten Pakualaman dengan Kasultanan Yogyakarta. Sri Sultan HB IX menyambut baik gagasan tersebut.

Sejak itu, eratnya kepemimpinan bersama antara orang nomor 1 dan 2 di Yogyakarta ini terus berlanjut. Pasca Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, mereka berdua sepakat untuk bergabung dengan Republik. Hingga kini kedua monarki terus saling bahu-membahu menjadi kekuatan utama bagi keistimewaan Yogyakarta. Meskipun silih berganti, mulai dari Sri Sultan HB IX hingga HB X dan Paku Alam VIII hingga PA IX kerja sama itu terus terbangun erat. Kini siapa pun yang bakal menjadi Paku Alam X tentu semuanya berharap agar sinergi itu makin kompak demi rakyat. \*\*\*

**Hendra Kurniawan, M.Pd.,**  
Dosen Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.